

**KOMUNIKASI BENCANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
MENGHADAPI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TAHUN 2023**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (Humas)



Oleh

**MELRISA DARYANIS MAHDILA
07031382025211**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**KOMUNIKASI BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM MENGHADAPI KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2023**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Komunikasi**

Oleh

**Melisa Daryanis Mahdila
07031382025211**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.SI
NIP. 199208222018031001



Pembimbing II

Tanda Tangan

M. Hidayatul Ilham, S.IP., M.I.Kom
NIP. 199410112022031009



Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

**KOMUNIKASI BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM MENGHADAPI KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN TAHUN 2023**

SKRIPSI

Oleh

**MELRISA DARYANIS MAHDILA
(07031382025211)**

**Telah dipertahankan di Depan Komisi Penguji
Pada tanggal 19 November 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

KOMISI PENGUJI

**Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si
NIP. 199208222018031001**

**M. Hidayatul Ilham, S.IP., M.I.Kom
NIP. 199410112022031009**

**Ryan Adam, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 198709072022031003**

**Eko Pebryan Jaya, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 198902202022031006**



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,



**Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001**

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melrisa Daryanis Mahdila
NIM : 07031382025211
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 16 Maret 2003
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera
Selatan dalam Menghadapi Kebakaran Hutan dan
Lahan Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,

Yang membuat pernyataan



Melrisa Daryanis Mahdila
NIM. 07031382025211

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“The flower that blooms in adversity is the rarest and
most beautiful of all”*

(A quote from Disney’s Mulan)

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

- 1. Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik yang selalu memberikan dukungan**
- 2. Teman-Teman yang selalu mendukung peneliti**
- 3. Almameter Kampus Universitas Sriwijaya**

ABSTRACT

This research aims to analyze the forms of disaster communication carried out by the BPBD of South Sumatra Province in dealing with forest and land fires in 2023, and identify the obstacles faced in the communication process. This research uses a qualitative approach with Haddow & Haddow's disaster communication theory. This theory includes four main dimensions: customer focus, leadership commitment, situational awareness, and media partnership. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and document studies, and analyzed descriptively. The results showed that BPBD South Sumatra Province implemented various stages of disaster communication, including direct information delivery, and information delivery through mass media, social media, and local communities to increase public awareness and participation. However, there are several obstacles, such as limited facilities and infrastructure, and still a lack of awareness from some of the community itself, as well as challenges in establishing coordination with the media and other stakeholders. Therefore, the BPBD of South Sumatra Province is expected to continue to improve disaster communication and optimization in dealing with the Land and Forest Fire disaster.

Keywords: *Disaster Communication, Forest and Land Fires, BPBD South Sumatra.*

Advisor I



Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si
NIP. 199208222018031001

Advisor II



M. Hidayatul Ilham, S.IP., M.I.Kom
NIP. 199410112022031009

Head of Communication Department



Dr. M. Husni Chamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi Karhutla tahun 2023, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses komunikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori komunikasi bencana dari Haddow & Haddow. Teori ini mencakup empat dimensi utama: *customer focus* (fokus pada target sasaran), *leadership commitment* (komitmen kepemimpinan), *situational awareness* (kesadaran akan situasi), dan *media partnership* (kerjasama media). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Provinsi Sumatera Selatan menerapkan berbagai tahapan komunikasi bencana, termasuk penyampaian informasi secara langsung, dan penyampaian informasi melalui media massa, media sosial, dan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, dan masih kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat itu sendiri, serta tantangan dalam menjalin koordinasi dengan media dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu BPBD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan terus meningkatkan komunikasi bencana dan pengoptimalan dalam menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kata Kunci: Komunikasi Bencana, Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBD Sumatera Selatan.

Pembimbing I



Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si
NIP. 199208222018031001

Pembimbing II



M. Hidayatul Ilham, S.IP., M.I.Kom
NIP. 199410112022031009

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat (Humas) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, saran, dan motivasi selama penulis membuat skripsi.
5. Bapak M. Hidayatul Ilham, S.IP., M.I.Kom selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, saran, dan motivasi selama penulis membuat skripsi.
6. Ibu Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom., AMIPR selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, semangat, dan saran selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen beserta Staf Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

9. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang selalu menjadi penyemangat dan *support system* terbaik, selalu mendukung segala hal baik dari dukungan moral dan finansial yang tidak henti-hentinya diberikan agar saya selalu semangat menyelesaikan pendidikan dan kuat menghadapi segala hambatan, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah saya.
10. Kak Edo dan Adek Fauzan, kakak dan adik. Yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan mendukung setiap langkah penulis.
11. Teman-teman penulis, baik teman di perkuliahan maupun teman di luar perkuliahan, Vallendiah, Bitak, Vania, Salwa, Putri, Yola dan teman-teman lainnya yang selalu ada untuk membantu, dan memberi semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat banyak kekurangan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas ataupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan Pendidikan di masa yang akan datang.

Palembang,

Melrisa Daryanis Mahdila

NIM. 07031382025211

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	ivi
ABSTRAK	ivi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Sumatera Selatan Merupakan Daerah yang Setiap Tahun Mengalami Kebakaran Hutan dan Lahan	6
1.1.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan	8
Sebagai Instansi yang Menjadi Koordinator Penanggulangan Bencana	8
1.1.3 Komunikasi Bencana Penting untuk dilakukan	12
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.2 Komunikasi	17
2.3 Bencana	18
2.3.1 Tahapan Bencana	19
2.4 Komunikasi Bencana	21
2.4 Kebakaran Hutan dan Lahan	21
2.4.1 Upaya-Upaya Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ..	22
2.5 Teori Komunikasi Bencana	23
2.6 Kerangka Teori	25
2.7 Kerangka Pemikiran	26
2.8 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	34

3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Definisi Konsep	34
3.2.1 Komunikasi.....	34
3.2.2 Bencana	35
3.2.3 Komunikasi Bencana.....	35
3.2.3.1 Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana.....	35
3.2.4 Kebakaran Hutan dan Lahan	36
3.3 Fokus Penelitian.....	36
3.4 Unit Analisis	38
3.4.1 Unit Analisis	38
3.4.2 Unit Observasi	39
3.5 Informan Penelitian.....	39
3.5.1 Kriteria Informan.....	39
3.5.2 Informan Kunci (<i>Key Informant</i>).....	40
3.5.3 Informan Pendukung	40
3.6 Sumber Data	41
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7.1 Wawancara Mendalam (<i>Indepth Interview</i>)	42
3.7.2 Observasi	42
3.7.3 Studi Dokumentasi	43
3.8 Teknik Keabsahan Data	43
3.9 Teknik Analisis Data	44
3.9.1 Kondensasi Data	44
3.9.2 Penyajian Data	45
3.9.3 Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	46
Sumatera Selatan.....	46
4.2 Logo Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	46
Sumatera Selatan.....	46
4.3 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.....	47
Sumatera Selatan.....	47
4.3.1 Visi	47
4.3.1 Misi.....	48
4.4 Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.....	48

Sumatera Selatan.....	48
4.5 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	50
Sumatera Selatan.....	50
4.6 Penyelenggaraan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Analisis Mengenai <i>Customer Focus</i> (Berkonsentrasi terhadap kelompok sasaran)	53
5.1.1 Analisis Target Sasaran	53
5.1.2 Analisis Pesan yang Diberikan Kepada Target	54
5.1.3 Analisis Mengenai Respon	58
5.2 Analisis Mengenai <i>Leadership Commitment</i> (Adanya Komitmen Kepemimpinan) ..	60
5.2.1 Analisis Koordinasi antar Lembaga.....	61
5.2.2 Analisis Koordinasi antar Organisasi/Kelompok Masyarakat.....	63
5.3 Analisis Mengenai <i>Situational Awareness</i> (Kesadaran Terkait Situasi dan Kondisi) ..	66
5.3.1 Analisis Mengenai Informasi.....	67
5.3.2 Analisis Mengenai Tindakan	69
5.3.3 Analisis Mengenai Evaluasi	72
5.4 Analisis Mengenai <i>Media Partnership</i> (Kerjasama Dengan Media).....	73
5.5 Pembahasan	76
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran	81
6.2.1 Akademis	81
6.2.2 Praktis	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Indeks Standar Pencemaran Udara KLKH.....	4
Tabel 1. 2 Data Sebaran Hotspot Per Kabupaten Bulan Januari-Desember 2023 ..	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahuli	30
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dokumentasi Rapat Koordinasi KARHUTLA Tahun 2023	10
Gambar 1. 2 Dokumentasi Rapat Koordinasi KARHUTLA Tahun 2023	10
Gambar 4. 1 Logo BPBD Sumatera Selatan	47
Gambar 5. 1 Pemasangan Papan Himbauan “STOP! Membakar Hutan dan Lahan”	55
Gambar 5. 2 Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KARHUTLA oleh BPBD Sumsel kepada masyarakat Ogan Ilir	57
Gambar 5. 3 Dokumentasi Posko KARHUTLA BPBD Sumsel	60
Gambar 5. 4 Rapat Koordinasi KARHUTLA Provinsi Sumsel Tahun 2023	62
Gambar 5. 5 Koordinasi dan Sosialisasi BPBD Sumsel dengan Satlinmas Kota Palembang Terkait Tanggap Bencana	65
Gambar 5. 6 Laman <i>Website</i> Resmi BPBD Provinsi Sumatera Selatan	74
Gambar 5. 7 Laman Instagram Resmi BPBD Provinsi Sumatera Selatan.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Hotspot Perbulan Provinsi Sumsel Tahun 2023	3
Grafik 1. 2 Data Hotspot Sumsel 5 Tahun Terakhir 2019-2023	7

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran	28
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi BPBD Sumsel	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu keberlangsungan hidup manusia yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam bahkan faktor manusia, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, jatuhnya korban jiwa, dan dampak psikologi. Ketika suatu bencana terjadi, koordinasi komunikasi adalah hal yang sangat penting, karena saat terjadi suatu bencana terdapat banyak tuntutan yang datang dari masyarakat kepada lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam menangani bencana secara cepat dan tanggap.

Menurut Amhar dan Darmawan (2007), terdapat tiga jenis definisi bencana, yaitu bencana geologis yang mencakup gempa bumi, tsunami, *volcano* (gunung api), tanah longsor, kemudian bencana meteorologis yang merupakan fenomena alam yang dapat dipantau cukup baik dengan menggunakan pemantauan yang sistematis menggunakan stasiun pemantau dan satelit cuaca, bencana meteorologis juga mempunyai kaitan dengan kegiatan manusia (lahan hijau/lahan resapan air, drainase, pintu air, pompa).

Beberapa jenis bencana meteorologis meliputi gelombang laut, banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta badai atau tornado. Sementara itu, bencana antropogenik adalah bencana yang terjadi akibat tindakan manusia, baik karena kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian, yang berdampak luas pada lingkungan. Contohnya termasuk kerusakan industri, sabotase, terorisme, kerusuhan, dan konflik sosial. (Tamitiadini dkk., 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana, dijelaskan bahwa “bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dampak yang ditimbulkan apabila terjadinya bencana akan sangat merugikan lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia oleh karena itu diperlukan cara yang tepat bagi manusia untuk bertahan hidup apabila terjadi bencana.

Masyarakat dan pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana, melakukan persiapan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana dan menemukan cara untuk mengelola bantuan pascabencana dan pemulihan kebutuhan para korban setelah terjadi bencana. Salah satu bencana tahunan yang selalu terjadi di Indonesia dan selalu menjadi isu hangat ketika memasuki musim kemarau adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa disingkat sebagai KARHUTLA adalah suatu peristiwa dimana terbakarnya suatu lahan dan hutan yang dapat terjadi karena dua faktor, baik secara alami ataupun karena perbuatan manusia.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 90% peristiwa KARHUTLA yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh perbuatan manusia, sedangkan kondisi panas yang dipengaruhi El Nino menjadi faktor yang mempercepat terjadi kebakaran. Sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tahun 1982/1983 yang cukup besar di Kalimantan Timur, intensitas kebakaran

hutan dan lahan makin sering terjadi di tahun berikutnya dan semakin meluas. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia kini dianggap sebagai fenomena bencana yang berdampak secara regional dan global, karena efek yang ditimbulkan setelah kebakaran tersebut meluas hingga ke negara-negara lain. (Dr. Nurdin dkk, 2016).

Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan status siaga darurat terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan Lahan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan antara Januari hingga September 2023 mencapai 32.496,5 hektar. Di antara wilayah yang terbakar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menempati posisi teratas dengan total lahan yang terbakar mencapai 20.558 hektar, yang terdiri dari 9.092,5 hektar lahan gambut dan 11.465,8 hektar lahan non-gambut. (YK Putra & Muhammad Valdy Arief, 2023).

Grafik 1. 1 Jumlah Hotspot Perbulan Provinsi Sumsel Tahun 2023



Sumber: Lapan modis BPBD Sumsel, 2023

Kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan berbagai aspek kehidupan yang luas sehingga sangat berdampak bagi kerusakan ekosistem lingkungan, seperti terjadinya polusi udara berupa kabut asap yang tebal yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, seperti terhentinya kegiatan pertanian, terganggunya akses transportasi, serta menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat. Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih berlangsung di Sumatera Selatan berdampak negatif pada kualitas udara di beberapa daerah, terutama di Kota Palembang. Ini dapat dilihat dari Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Palembang yang terus menunjukkan penurunan ke tingkat yang buruk, bahkan berbahaya.

Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Palembang pada awal Oktober 2023 menunjukkan konsentrasi partikel PM 2.5 berada antara 200 hingga 300 mikrogram per meter kubik, yang dikategorikan sangat tidak sehat dan berbahaya. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang ISPU, kualitas udara yang baik berada dalam rentang 0-50, sedangkan 51-100 menunjukkan kualitas sedang. Rentang 101-200 dianggap tidak sehat dan dapat membahayakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kualitas udara yang sangat tidak sehat terletak pada rentang 201-300, yang dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok sensitif. Sementara itu, kualitas udara berbahaya, yang berada di atas 300, dapat mengancam kesehatan secara serius dan memerlukan penanganan segera.

Tabel 1. 1
Data Indeks Standar Pencemaran Udara KLKH

No	Nama Daerah	Indeks Kualitas Udara
1.	Sumatera Selatan	209
2.	Jawa Barat	144
3.	Banten	130
4.	DKI Jakarta	116
5.	Kalimantan Selatan	86
6.	Jambi	85
7.	Riau	75
8.	Jawa Timur	73
9.	Kepulauan Riau	70
10.	Sulawesi Selatan	68

Sumber: Halaman Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) KLHK (27/10/2023)

Berdasarkan data tanggal 27 Oktober 2023, Sumatera Selatan kembali berada di posisi pertama sebagai indeks kualitas udara terburuk dengan indeks kualitas udara 209. Melihat dari data-data yang ada dampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan saat ini sudah sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Dampak kabut asap ini salah satunya ditandai dengan meningkatnya pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Palembang.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang menunjukkan bahwa jumlah orang yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada September 2023 mencapai 10.708, meningkat dari 9.367 kasus pada bulan sebelumnya. Pada awal Februari, Dinas Kesehatan mencatat ada 14.960 penderita ISPA. Secara rata-rata,

kasus ISPA per hari berkisar antara 600 hingga 700, dengan mayoritas penderita berasal dari kalangan bayi dan balita.

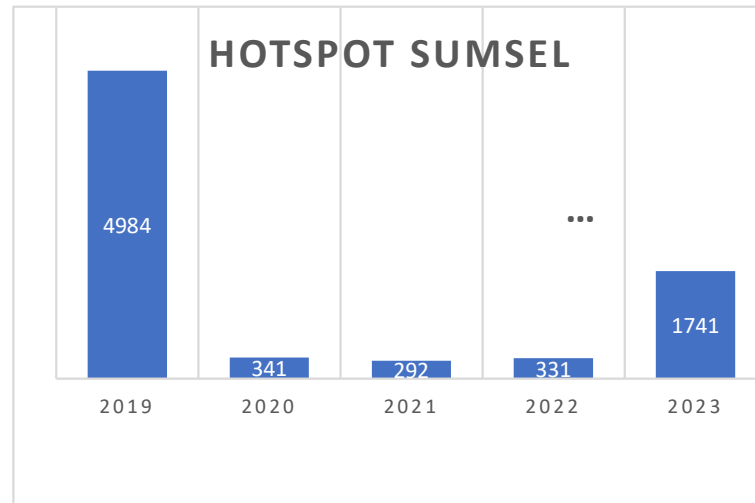
Selain berdampak bagi kesehatan, kebakaran hutan dan lahan juga mempengaruhi bisnis dan usaha, karena adanya kabut asap yang tebal berdampak terhadap sisi operasional misalnya seperti jasa transportasi yang harus menghentikan perjalanan karena tertutup kabut asap, dan juga kabut asap yang semakin tebal sangat berpotensi mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan. Situasi ini tentu berpengaruh terhadap jumlah kunjungan masyarakat ke tempat-tempat tertentu seperti pusat perbelanjaan.

1.1.1 Sumatera Selatan Merupakan Daerah yang Setiap Tahun Mengalami

Kebakaran Hutan dan Lahan

Periode tahun 2015-2019, Sumatera Selatan menjadi daerah yang memiliki tingkat KARHUTLA terluas di Indonesia, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan mencapai 1.011.733,97 hektar. Di tahun 2015 dengan luas KARHUTLA 646.298,80 hektar, tahun 2018 seluas 16.226,60 hektar dan tahun 2019 seluas 336.778 hektar. Berdasarkan data Manggala Agni Sumsel dalam (Tasmalinda, 2023) pada tahun 2019 jumlah titik panas mencapai angka 4984, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan titik panas dengan total 341, di tahun 2021 mengalami 292 titik panas, pada tahun 2022 mengalami 331 titik panas, dan di tahun 2023 terhitung sampai september ditemukan 1741 titik panas. Jika dibandingkan selama lima tahun terakhir, jumlah titik panas pada 2023 meningkat dibanding lima tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2019 juga mengalami titik panas yang lebih banyak dibandingkan tahun 2023 ini.

Grafik 1. 2
Data Hotspot Sumsel 5 Tahun Terakhir 2019-2023



Sumber: Manggala Agni Sumsel dalam (Suarasumsel.id, 2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah titik panas yang berbeda-beda. Dengan total titik panas tertinggi di tahun 2019, dibanding dengan tiga tahun sebelumnya, jumlah titik panas di tahun 2023 memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Tabel 1. 2

Data sebaran hotspot per kabupaten bulan Januari-Desember 2023

SEBARAN HOTSPOT PER KABUPATEN BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2023														
NO	KOTA / KABUPATEN	SEBARAN PER BULAN 2023												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Palembang							2	2	24	26	1		55
2	Pagaralam			1	1			1	1	2	5			11
3	Lubuk Linggau		1							8	5			14
4	Prabumulih		1	2	3	2	5		1	5	30			49
5	Ogan Ilir		4	9	4	12	13	69	292	359	16			778
6	Ogan Komering Ilir	6	5	6	10	9	17	36	216	3131	6113	355		9904
7	Ogan Komering Ulu	4	2	4	11	6	9	1	52	283	203	11		586
8	OKU Timur				4	5	6	8	27	216	406	19		691
9	OKU Selatan	1	2		8	3	8	5	30	91	173	19		340
10	Musi Rawas	12	5	11	57	34	23	16	107	202	245	4		716
11	Musi Banyuasin	9	2	25	33	39	32	30	97	463	611	27		1358
12	Banyuasin	2	4	12	4	16	6	26	96	717	982	76		1941
13	Empat Lawang	3	4	1	17	3	6	15	38	69	62	1		219
14	Lahat	3	4	5	10	19	13	19	110	163	178	7		531
15	Muara Enim	6	4	6	22	17	19	14	53	255	317	9		722
16	Muratara	8	6	9	38	60	16	19	84	277	439	11		967
17	PALI		3	5	8	33	11	5	25	139	92	2		323
TOTAL / BULAN		54	43	91	235	250	183	210	1008	6327	10246	558		19205

Sumber: Lapan modis BPBD Sumsel

Menurut data sebaran *hotspot* provinsi Sumatera Selatan periode Januari-Desember 2023 menunjukkan Ogan Komering Ilir menjadi kabupaten dengan *hotspot* tertinggi diantara kabupaten lainnya dengan jumlah 9904 sebaran *hotpost*, di susul dengan Banyuasin dengan sebaran 1941 *hotspot*, dan Musi Rawas dengan 1358 *hotspot*. Data tersebut juga menunjukkan bahwa setiap Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan terdapat sebaran hotspot dengan jumlah yang berbeda.

1.1.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan

Sebagai Instansi yang Menjadi Koordinator Penanggulangan Bencana

Awal mula terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diawali dengan berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan induk dari BPBD. Di Indonesia bencana kerap terjadi di setiap daerah bukan hanya di daerah-daerah tertentu saja, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi, kabupaten/kota madya. Terbentuknya BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat memberikan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB, sehingga sekarang sebagian besar Provinsi yang memiliki potensi rawan bencana di Indonesia secara hukum diharuskan mendirikan BPBD di daerahnya.

BPBD merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif terkait penanganan bencana maupun pencegahan dalam pengurangan risiko bencana, yang dimana fungsi utama dari BPBD adalah penanggulangan bencana. Lembaga ini memiliki peran sebagai kordinator, dan komando yang bertanggungjawab atas tugas negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin melalui satelit untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi-lokasi yang selama ini rawan terbakar. Langkah antisipasi pencegahan dan pengendalian bahaya KARHUTLA, merupakan kegiatan rutin yang menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholder* terkait di Sumatera Selatan. Lembaga pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan, menggelar rapat koordinasi khusus KARHUTLA tahun 2023 bersama BMKG Sumsel, BPBD Sumsel, Dinas Kehutanan, Perangkat Daerah terkait, KPHP, Manggala Agni, TNI, dan POLRI.



Gambar 1. 1 Dokumentasi Rapat Koordinasi KARHUTLA Tahun 2023

Sumber: bpbdsumselprov.go.id



Gambar 1. 2

Dokumentasi Rapat Koordinasi KARHUTLA Antar Lembaga 2023

Sumber: bpbdsumselprov.go.id

Lembaga pemerintah tersebut masing-masing memiliki peran aktif dalam upaya menghadapi KARHUTLA di Sumatera Selatan, saling terikatnya lembaga pemerintah ini dengan tugas dan fungsinya masing-masing tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang di koordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan berupa perumusan dan penetapan kebijakan pencegahan dan penanganan yang bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus terhadap komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Selatan pada bencana kebakaran hutan dan lahan, yang berperan aktif sebagai salah satu instansi kelembagaan yang menjadi kordinator dan bergerak dalam proses penanganan bencana, khususnya pada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan. Pencegahan bencana yang dilakukan BPBD Sumatera Selatan memiliki beberapa tahapan yaitu, fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Segala proses tahapan penanggulangan bencana membutuhkan strategi komunikasi sehingga informasi pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat ke masyarakat. Adapun hal tersebut menjadikan penelitian ini untuk memilih BPBD sebagai objek dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Sumatera Selatam dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

1.1.3 Komunikasi Bencana Penting untuk dilakukan

Berbicara tentang bencana, penting untuk mempertimbangkan fungsi dan peran komunikatifnya. Komunikasi berperan krusial sebagai koordinator dalam pelaksanaan rekomendasi dari pimpinan. Selain itu, komunikasi juga memiliki dampak signifikan baik dalam konteks sosial maupun bagi individu secara keseluruhan. Melalui komunikasi, orang dapat mengakses berbagai informasi tentang aspek sosial dan lingkungan.

Komunikasi bencana secara umum menurut Wardhani dalam Perspektif Komunikasi Bencana (Lestari, 2018) Proses pengiriman dan penerimaan pesan atau tindakan disebut komunikasi. Komunikasi memerlukan partisipasi dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, sehingga semua peserta memiliki fokus yang sama terhadap topik yang dibahas. Dalam konteks bencana, komunikasi berfungsi sebagai radar sosial yang memberikan kepastian kepada pihak lain tentang keberadaan bencana di suatu lokasi. Radar sosial ini menyebarkan informasi kepada berbagai pihak untuk mengurangi risiko bencana.

Komunikasi juga menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kesiapsiagaan yang perlu diambil dan persiapan yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Semua upaya ini bertujuan untuk menurunkan jumlah korban jiwa dan kerugian material. Dengan melakukan penanggulangan bencana seawal mungkin, diharapkan muncul kesadaran, tindakan, dan perilaku yang meningkatkan kemampuan manusia dalam menghadapi ancaman bencana. Oleh karena itu, komunikasi bencana menjadi elemen penting dalam proses penanggulangan bencana dan respon kesiapsiagaan terhadap situasi bencana. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya khusus untuk mengikutsertakan

masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. (Tamitiadini dkk., 2019).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh (Rohayati & Alhidayatillah, 2020) yang melihat seberapa optimalisasi komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Riau dalam mengurangi kabut asap di Provinsi Riau. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa BPBD Riau telah menjalankan pelaksanaan komunikasi bencana secara optimal dengan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu: kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Penelitian lainnya dengan judul Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Nagas Raya pada Situasi Terdapat Potensi Bencana, hasil penelitian tersebut menunjukkan BPBD Nagas Raya dalam manajemen komunikasi bencana situasi terdapat potensi bencana belum optimal karena disebabkan beberapa faktor seperti masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat Nagas Raya, minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya keaktifan di media sosial.

Upaya menghadapi kebakaran hutan dan lahan memerlukan strategi yang melibatkan partisipasi dari masyarakat, dan komunikasi yang efektif guna memperoleh efektifitas dan optimalisasi sumberdaya diperlukan untuk menjalankan koordinasi yang harmonis (Eko Harry Susanto, 2011). Berdasarkan hasil dari pemahaman dari penelitian-penelitian terdahulu, adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini yaitu instansi yang menjadi objek penelitian, dan subjek pada penelitian, dalam penelitian ini akan berfokus mengangkat isu bencana dari perspektif komunikasi, karena komunikasi dianggap menjadi sarana penting dalam penyampaian pesan yang terkait dengan isu bencana kebakaran hutan dan lahan.

Instansi BPBD Sumatera Selatan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan menerapkan tiga tahapan yaitu tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tantangan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan tetap ada. Oleh karena itu, menandakan seberapa optimalisasi komunikasi bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Sumsel dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, namun tetap ada kebutuhan untuk terus memperbaiki dan memperkuat aspek komunikasi bencana dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang masih berulang terjadi setiap tahun.

Melihat realitanya masih banyak oknum yang melakukan pembakaran lahan secara illegal yang menyebabkan kebakaran lahan setiap tahunnya menandakan bahwa masyarakat masih kurangnya partisipasi dan pemahaman mengenai dampak dan kerugian yang dihasilkan dari pembakaran lahan untuk kehidupan. Penanganan pengendalian KARHUTLA masih belum dikatakan berjalan secara optimal. Keterpaduan dalam pengendalian KARHUTLA sangat diperlukan mengingat banyak pihak yang terkait dengan dampak KARHUTLA. Saat ini diperlukan sebuah strategi pengendalian KARHUTLA sebagai solusi dari sistem yang ada, yang cenderung terpusat serta dapat mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam upaya perlindungan kawasan hutan dan lahan.

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul **“Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan yang telah dijelaskan pada latar belakang, berikut rumusan masalah yang dibuat yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023?
2. Apa saja yang menjadi penghambat komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk komunikasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Sumsel dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi penghambat komunikasi BPBD Sumatera Selatan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi segala pihak yang memerlukan hasil penelitian ini
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan komunikasi bencana

- c. Menciptakan iklim komunikasi dan memunculkan pemahaman tentang komunikasi bencana yang dapat mendorong pada kesadaran yang berkaitan dengan tindakan pembakaran hutan dan lahan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Mengetahui tindakan penanganan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel untuk meminimalisir KARHUTLA sehingga dapat membentuk sikap dan pemahaman untuk tidak lagi membakar hutan dan lahan.

b. Manfaat bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah

Menjadi acuan dan bahan evaluasi untuk tindakan yang dapat dilakukan guna menekan jumlah KARHUTLA melalui komunikasi bencana yang akan dilakukan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amhar, F., & Darmawan, M. (2007). *A Study on Multihazard Maps, Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- Arif, M., & Lestari, S. S. (2021). Manajemen Komunikasi Bencana Pemerintah Desa dalam Penanganan Covid-19. *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.24014/kjcs.v3i1.13729>
- Cangara, H. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Danil, M. (2021). Manajemen Bencana Alam. *Universitas Dharmawangsa, November*, 7–14.
- Eko Harry Susanto. (2011). Komunikasi Bencana. Dalam *Komunikasi Bencana: Vol. Maret* (hlm. 81–116).
- Haddow, G. D., & Haddow, K. S. (2009). *Disaster communications in a changing media world*. Elsevier.
- K, F. A., & Uman, C. (2019). Komunikasi Bencana Sebagai Sebuah Sistem Penanganan Bencana Di Indonesia. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 25–37. <https://doi.org/10.35760/mkm.2019.v3i1.1980>

- Lestari, P. (2018). Perspektif Komunikasi Bencana. Dalam *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://eprints.upnyk.ac.id/23779/1/Puji Lestari - Buku Komunikasi Bencana Aspek Penting.pdf](http://eprints.upnyk.ac.id/23779/1/Puji%20Lestari%20-%20Buku%20Komunikasi%20Bencana%20Aspek%20Penting.pdf)
- Marina, F., Maulina, P., & Fadhlain, S. (2021). Manajemen komunikasi bencana BPBD Nagan Raya pada situasi terdapat potensi bencana. *Jimsi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 1(1), 14–22.
- Morissan. (2017). *Metode Penelitian Survei* (Cetakan ke). K E N C A N A.
- Pawito, Ph. D. (2007). *PENELITIAN KOMUNIKASI KUALITATIF*. PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, Pub. L. No. 14 (2020).
- Perdana, D. D., & Siregar, R. L. V. (2022). Komunikasi Mitigasi Bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu pada Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Lemau. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v6i1.12464>
- Rohayati, R., & Alhidayatillah, N. (2020). Optimalisasi Komunikasi Bencana dalam Mengurangi Kabut Asap di Provinsi Riau. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2865>
- Sugiyono, Prof. Dr. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd, Ed.; Edisi Kedu). ALFABETA, cv.

Tamitiadini, D., Adila, I., & Weda Asmara Dewi, W. (2019). *Komunikasi Bencana Teori dan Pendekatan Praktis Studi Kebencanaan di Indonesia* (D. Tamitiadini, I. Adila, & W. Weda Asmara Dewi, Ed.). UB Press.

Tasmalinda. (2023, September 27). Selama 5 Tahun Terakhir, Sumsel Jadi Provinsi Alami Karhutla Terluas. *Suarasumsel.id*.

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 (2007).

Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pub. L. No. 41 (1999).

YK Putra, A., & Muhammad Valdy Arief, T. (2023). 32.496 Hektar Lahan di Sumsel Terbakar, Paling Luas di Kabupaten OKI. *Kompas.com*.